

The book cover features a white background with a faint, large-scale American flag pattern. In the top right corner, a portion of the real American flag is visible, appearing to be peeling away. The title is written in a bold, red, serif font. The central graphic is a silhouette of the Statue of Liberty, filled with the stars and stripes of the American flag. Below the statue, there are horizontal stripes of red and white, and at the bottom, a red silhouette of a city skyline.

AMERIKA SERIKAT
dan **REZIM KEBENARAN**

GREVILDO AUSTHIN YOEL
ARTHUUR JEVERSON MAYA

AMERIKA SERIKAT DAN REZIM KEBENARAN

Penulis:

**Grevildo Austhin Yoel
Arthuur Jeverson Maya**



UKI PRESS

Pusat Penerbitan dan Pencetakan

Buku Perguruan Tinggi

Universitas Kristen Indonesia

Jakarta

2024

AMERIKA SERIKAT DAN REZIM KEBENARAN

Penulis:

**Grevildo Austhin Yoel
Arthuur Jeverson Maya**

Editor:

**Prof. Angel Damayanti, Ph.D
Adrianus Lengu Wene, S.Sos., M.Si.**

ISBN: 978-623-8737-19-2

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta - 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang.

**Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.**

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I KUASA-PENGETAHUAN.....	1
1.1. Kuasa-Pengetahuan Foucault.....	1
1.2. Sovereign Power	2
1.3. Disciplinary Power	3
1.4. Governmentality.....	5
BAB II DISTURBANSI TERHADAP SANG ELANG AGUNG	9
2.1. Disturbansi Gejolak Serangan 11 September 2001.....	9
2.1.1. Penyerangan 9/11	9
2.1.2. Retakan.....	11
2.1.3. 9/11 Disturbansi Realita.....	13
2.2. Disturbansi Teror Biologis Kimiawi dan Antraks.....	18
BAB III KEJATUHAN KUASA SANG ELANG AGUNG	23
3.1. Reduksi Kuasa <i>Superpower</i>	23
3.2. Kebisingan Intelijen: CIA dan FBI	24
3.3. Keremehan Menuju Keterpurukan: Para Pembuat Kebijakan	27
3.3.1. Egosentrisme dan Disabilitas Institusi	28
3.3.2. Kecacatan Militer: Strategis dan Taktis	30
3.4. Skeptisisme <i>Superpower</i> Sang Elang Agung?	33

BAB IV POWER – KNOWLEDGE: PENYERUPAAN REZIM KEBENARAN GLOBAL WAR ON TERROR	37
4.1. Kuasa-Pengetahuan Foucault <i>Governmentality</i> dan Rezim Kebenaran <i>War On Terror</i> Regenerasi Kuasa Sang Elang Agung.....	37
4.2. Petanda Penyerupaan Rezim Kebenaran: Baik Versus Jahat	41
4.2.1. Penyesuaian Diskursif Religi dan Perang Suci Kekristenan	45
4.2.2. Benturan Sentralitas Kebaikan-Kejahatan	49
4.2.3. Si Jahat Tanpa Wujud	52
4.3. Petanda Penyerupaan Rezim Kebenaran: Anti-Amerika ...	55
4.4. Petanda Penyerupaan Rezim Kebenaran: Teroris Selalu Islam.....	57
4.4.1. Islam Dalam Keteraturan Tatanan Diskursif <i>War On Terror</i> : Aglutinasi Teror.....	57
4.4.2. Muslim Dalam Keteraturan Diskurif <i>War On Terror</i> : Kita dan Mereka	62
4.4.3. Etnis Arab Dalam Keteraturan Diskurif <i>War On Terror</i> : Sang Karakter Imajiner Teror	64
4.5. Penyensoran Media dan <i>Hollywood</i>	66
4.6. Penyensoran Civil Society: Jihad Watch dan SIOA	74
4.7. Penyensoran Pemerintah: Normalisasi Kebijakan, Regulasi, Hukum, dan Aturan.....	80
4.8. Penyensoran Institusi: FAA dan TSA	83
BAB V MESIN KEKUASAAN <i>GOVERNMENTALITY</i> WAR ON <i>TERROR</i> DI ASIA TENGGARA	91
5.1. Penyensoran <i>War On Terror</i> AS Level Regional	91
5.1.1. Penyensoran Southeast Asia Treaty Organizaton (SEATO): Demokrasi.....	91

5.1.2. Penyensoran Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN): War On Terror dan Kontra-Terrorisme.....	101
5.2. Penyensoran <i>War On Terror</i> AS Level Nasional.....	121
5.2.1. Sensor Panoptikon di Malaysia.....	122
5.2.2. Sensor Panoptikon di Filipina.....	131
5.2.3. Sensor Panoptikon di Indonesia.....	145
BAB VI KONSEKUENSI EFEK DISKURSUS <i>WAR ON TERROR</i> DI INDONESIA.....	169
6.1. Efek Diskursus <i>War On Terror</i>	169
6.2. Kebenaran Kuasa-Pengetahuan <i>War On Terror</i>	171
6.3. Kepatuhan “Kita” Terhadap “Ancaman” Terorisme AS... ..	179
6.4. Persetujuan Kepatuhan Penyensoran <i>War On Terror</i> : BNPT dan Densus 88.....	182
6.5. Kepatuhan Terhadap Manifestasi Karakter Imajiner Penyerupaan Ancaman Teror.....	185
DAFTAR PUSTAKA.....	191
PROFIL PENULIS.....	208

BAB I

KUASA-PENGETAHUAN

1.1. Kuasa-Pengetahuan Foucault

Terdapat keperluan terhadap tuntunan dalam melakukan eksplorasi terhadap mesin suci yang mendisiplinkan tubuh kognitif untuk dapat melaksanakan perilaku keteraturan *War On Terror*. Michel Foucault memandang hal ini sebagai sebuah interaksi antara kuasa dan pengetahuan dalam rantai mutualisme penciptaan sebuah mekanisme suci kenyataan yang dihadirkan secara konstruktif dan *not given*. Kekuasaan dipandang Foucault, bukanlah kekuasaan yang terkonsentrasi pada institusi atau negara, sehingga menciptakan konotasi negatif meliputi mengeksklusi, menindas, menutupi, dan mengabstraksi. Akan tetapi ia menggambarkan dan mengakui bahwa kekuasaan mempunyai kapabilitas positif untuk menciptakan, membentuk serta mengonstruksikan objek ritual kebenaran dalam projek realita (Foucault 1977, 146).

Projek realita ini kemudian yang mewakili hal yang kita anggap sebagai bagian 'nyata' dari kehidupan. Mekanisme pembentukan realita ini diawali oleh transformasi atribut kekuasaan yang dipercaya sebagai kemampuan 'melawan secara fisik.' ke pengaruh yang lebih halus, konstan, efisien dan permanen (Foucault 1977, 152). Transformasi ini kemudian terkonsentrasikan ke dalam diri individu, dan dengan terkonsentrasinya kekuasaan, individu disengajai untuk tidak hanya mengambil peran sebagai objek yang dikuasai, namun ikut dalam menciptakan dinamika kekuasaan yang dipertahankan melalui interaksi dalam verbal maupun aksi.

Kekuasaan ini kemudian menciptakan pengetahuan, namun bukan hanya mendorongnya sebagai bentuk pelayanan pada kekuasaan atau mengimplementasikannya karena kegunaannya saja. Kekuasaan dan pengetahuan saling terkait secara langsung; tidak ada kekuasaan tanpa penciptaan pengetahuan yang sejalan, dan tidak ada pengetahuan yang tidak melibatkan serta mengimplikasikan hubungan kekuasaan. Dalam konteks ini, keberadaan kekuasaan dan pengetahuan selalu beriringan, di mana kekuasaan membentuk pengetahuan dan sebaliknya, tanpa pemisahan yang jelas antara keduanya (Foucault 1977, 25). Hubungan yang kompleks antara kekuasaan

dan pengetahuan kemudian dimaknai Foucault sebagai sebuah sarana bagi 'mereka' yang berusaha mendiskusikan makna sebenarnya dari sebuah kebenaran melalui wacana-wacana dalam pengonstruksian bangunan rezim kebenaran.

Foucault menekankan bahwa suatu wacana dapat dijustifikasi benar atau salah berdasarkan koherensi yang dibangun melalui mekanisme pola yang dapat dipahami dan mencakup aturan-aturan tertentu yang menentukan kebenaran dalam konteks sosial atau politik, ia juga menjustifikasi bahwa dalam pembentukan rezim kebenaran, praktek kekuasaan tidak akan selalu bersandar pada rasionalitas atau logika (Foucault 1978, 18). Foucault bermaksud untuk memberikan sebuah visualisasi terhadap hadirnya rezim kebenaran, menjadi cerminan terhadap usaha untuk pembatasan diri, di mana norma, nilai, dan prinsip diterapkan secara homogen demi pengontrolan. Rezim kebenaran ini kemudian melewati mekanisme yang kompleks secara sengaja menghadirkan, memeningkan, serta memproduksi variabel yang tidak terlihat dan tidak diakui untuk mendefinisikan keberadaan dan keberlangsungan 'ada' (Foucault 1978, 19). Foucault kemudian menguraikan tiga bentuk kekuasaan yakni *sovereign power*, *disciplinary power*, dan *governmentality*.

1.2. Sovereign Power

Sovereign power dapat dikatakan sebagai kekuasaan tradisional yang identik dengan sistem monarki atau otoritas negara sehingga memvisualisasikan keabsolutan kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum maupun institusi. Ini dipandang Foucault sebagai mitologi yang mendisiplinkan tubuh sosial melalui kerangka kuasa-pengetahuan dengan menghadirkan penguasa yang tidak hanya menjadi sosok yang kuno, namun luar biasa sekaligus mengerikan (Foucault 1980, 39).

Di mana dengan perangkat seperti yuridis kemudian menjadi bibit yang menanamkan kuasa kedaulatan. Ini bertujuan untuk mengungkapkan "kebenaran" yang bersifat tentatif bahwa figur penguasa seperti raja adalah manifestasi dari kuasa kedaulatan yang efektif sebagai penegasan kuasa (sekalipun absolut) namun sesuai dengan delusi fundamentalnya; atau ini sebaliknya dilaksanakan untuk menunjukkan kuasa raja yang terbatas namun dengan penundukan terhadap aturan dan hak yang diatur untuk tetap

dilaksanakan sebagai sesuatu yang sah terkait kedaulatan (Foucault 1980, 95). Pandangannya ini, memberikan kita sejumlah pemahaman terhadap *sovereign power* yang terslip dibalik teks.

Sovereign power menyilipkan sebuah mitologi terkait wacana dalam membangun penguasa yang seakan-akan berkepemilikan kuasa mulai dan absolut. Tren ini juga kemudian menciptakan sentralistik sosok individu atau sekelompok orang dengan kuasa atau konteks yang lebih kontemporer yakni otoritas tertinggi, membuat sosok tersebut seakan suci, sakral, kuno, atau (sekecil mungkin) mempunyai semacam kuasa supernatural. Sehingga kuasa *sovereign power* menempatkan otoritas negara atau figur tertentu sebagai penentu takdir suci dalam hukum dan keputusan yang didasarkan dengan dasar kedaulatan yang dimiliki. Atau justru sebaliknya bahwa terkadang tidak memerlukan sebuah figur untuk melanggengkan kuasa ini, namun dengan kehadiran regulasi, hukum, struktur, dan aturan tertentu dapat menjadikannya sangat brutal, dan secara paradoks ini yang membuat sejumlah eksekusi yang dilakukan tentara kita atas nama negara yang disakralkan sebagai tindakan untuk menciptakan posisi yang lebih aman dengan perlindungan para pembuat kebijakan dengan mengatasnamakan "kedaulatan negara" yang disisipkan dalam "kepentingan bersama."

Di mana kuasa *sovereign power* ini adalah kuasa yang dipahami Foucault sebagai satu kuasa berdampingan dengan *governmentality*. Dengan diferensiasi pada kedaulatan yang represif dan sah dalam kehidupan bermegara dalam menuntui wacana "warga negara yang baik" dan pada tangan yang satunya terdapat kuasa yang produktif untuk menormalisasikan wacana "warga negara yang baik." Dengan kuasa yang dilaksanakan terhadap masyarakat yang didasarkan terhadap heterogenitas melalui kepemilikan hak kedaulatan oleh masyarakat yang dikombinasikan dengan pendisiplinan yang bersifat politistik (Foucault 2001, 74). *Sovereign power* kemudian ditampilkan sebagai kuasa yang bersifat pada legislatif dengan *barrier* dan sensor pelanggaran dengan hukum dan regulasi.

1.3. Disciplinary Power

Disciplinary power dapat dipandang sebagai kekuasaan yang dinormalisasikan kedalam diri individu dengan melibatkan struktur yang terorganisir seperti institusi meliputi sekolah, rumah sakit, yang menerapkan

dilaksanakan sebagai sesuatu yang sah terkait kedaulatan (Foucault 1980, 95). Pandangannya ini, memberikan kita sejumlah pemahaman terhadap *sovereign power* yang terselip dibalik teks.

Sovereign power menyelipkan sebuah mitologi terkait wacana dalam membangun penguasa yang seakan-akan berkepemilikan kuasa mutlak dan absolut. Tren ini juga yang kemudian menciptakan sentralistik sosok individu atau sekelompok orang dengan kuasa atau dalam konteks yang lebih kontemporer yakni otoritas tertinggi, membuat sosok tersebut seakan suci, sakral, kuno, atau (sekecil mungkin) mempunyai semacam kuasa supernatural. Sehingga kuasa *Sovereign power* menempatkan otoritas negara atau figur tertentu sebagai penentu takdir suci dalam hukum dan keputusan yang didasarkan dengan dasar kedaulatan yang dimiliki. Atau justru sebaliknya bahwa terkadang tidak memerlukan sebuah figur untuk melanggengkan kuasa ini, namun dengan kehadiran regulasi, hukum, struktur, dan aturan tertentu dapat menjadikannya sangat brutal, dan secara paradoks ini yang membuat sejumlah eksekusi yang dilakukan tentara kita atas nama negara yang disakralkan sebagai tindakan untuk menciptakan posisi yang lebih aman dengan perlindungan para pembuat kebijakan dengan mengatasnamakan "kedaulatan negara" yang disisipkan dalam "kepentingan bersama."

Di mana kuasa *sovereign power* ini adalah kuasa yang dipahami Foucault sebagai satu kuasa berdampingan dengan *governmentality*. Dengan diferensiasi pada kedaulatan yang represif dan sah dalam kehidupan bernegara dalam menuntut wacana "warga negara yang baik" dan pada tangan yang satunya terdapat kuasa yang produktif untuk menormalisasikan wacana "warga negara yang baik." Dengan kuasa yang dilaksanakan terhadap masyarakat yang didasarkan terhadap heterogenitas melalui kepemilikan hak kedaulatan oleh masyarakat yang dikombinasikan dengan pendisiplinan yang bersifat polimorfik (Foucault 2001, 74). *Sovereign power* kemudian ditampilkan sebagai kuasa yang bersifat pada legislatif dengan *barrier* dan sensor pelanggaran dengan hukum dan regulasi.

1.3. Disciplinary Power

Disciplinary power dapat dipandang sebagai kekuasaan yang diinternalisasikan kedalam diri individu dengan melibatkan struktur yang terorganisir seperti institusi meliputi sekolah, rumah sakit, yang menerapkan

aturan dan norma tertentu sehingga terjadi keterbalikan peran di mana individu sebagai objek yang dikontrol oleh kuasa. Secara spesifik Foucault melihat bahwa, semua tindakan makhluk sosial pada level individu akan mengalami penyesuaian diskursif terhadap tatanan yang dijadikan sebagai perbandingan, perbedaan, dan persamaan prinsip aturan, regulasi, serta yang perlu diikuti sebagai suatu kebenaran (Foucault 1977, 182).

Ansambel seperti demikian, kemudian memutarbalikan peran subjek yang dikontrol oleh kuasa yang mendisiplinkan dirinya untuk berperilaku. Dalam hal ini kekuatan disipliner, akan menjadikan yang “tidak ada” menjadi “ada,” “tidak normal” menjadi “normal” dan “ketidakbenaran” menjadi “kebenaran.” Membuat subjek pada ujung pendisiplinkan untuk dapat berbicara, berperilaku, bertindak, dan bahkan berpikir dengan homogen (Foucault 1977, 177-184).

Disciplinary power kemudian dapat dipahami sebagai serangkaian sistem sensoritas pengetahuan yang menjadikan subjek individu sebagai objek dalam sebuah relasi dengan yang lainnya. Sehingga ketika terjadinya penyimpangan dari norma yang diverifikasi bersama dalam “kenormalan” akan ditetapkan sebagai “ketidaknormalan dan kelainan.” Pada akhirnya, ini akan membawa mereka pada sistem pengkoreksian dengan dalih “perbaikan” untuk merehabilitasi karena ketidaktoleransian terhadap kecacatan dalam “kenormalan.” Dengan maksud bahwa ketidaksesuaian dengan keteraturan yang ada dapat dihukum yang kemudian akan mensterilkan dan menghomogenisasikan untuk menjadi serupa dan sama, dan yang berbeda akan menjadi yang inferior dalam tatanan superior (Foucault 1977, 177-184).

Dengan *disciplinary power*, membuat individu tidak hanya sebagai objek. Namun mereka berada dalam rantai mutualisme kuasa-pengetahuan yang mendilemakan subjek dan objek yang dapat bertukar peran kapan saja. Di mana disiplin pada akhirnya akan membentuk individu, dan individu akan menjadi instrumen pelaksanaan keteraturan. Wacana yang terinternalisasi kemudian akan menyesuaikan dirinya dengan pertarungan kognitif individu yang juga ikut menyesuaikan dengan struktur diskursif tatanan.

Disciplinary power akan menjadi motor penggerak yang beresonansi dengan ruang dan waktu. Seperti halnya terkait pengorganisasian yang menjadi visualisasi kekuatan disiplin, di mana individu dan ruang akan diatur dalam sebuah “pola aktivitas” untuk mengoptimalkan fungsi wacana yang

terrealisasikan melalui tindakan tubuh kognitif individu. Dengan dalih peningkatan kinerja akan dapat dimaksimalkan dengan pengoptimalan disiplin yang mengatur gerak tubuh individu, sehingga semakin banyak waktu yang diekstraksi dan diatur dengan pendisiplinan, maka akan berbanding lurus sejumlah kekuatan yang dapat dimanfaatkan (Foucault 1977, 154). Sehingga *disciplinary power* akan menjadi inti yang menggerakkan tubuh kognitif individu untuk melihat kuasa yang beroperasi didalamnya untuk dapat berperilaku, dengan wacana yang terinternalisasi akan mempengaruhi tindakan, dan tindakan akan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan akan mempengaruhi karakter, dan karakter individu yang akan mempengaruhi perilaku kehidupan subjek dalam tatanan dan menjadikan realitas hasil dari interaksi mutulisme dari kuasa dan pengetahuan pada level individu.

1.4. Governmentality

Foucault melihat bahwa negara modern mempunyai seninya sendiri untuk mengatur, mengontrol, dan menormalisasikan dalam tubuh subjek populasi. Pada level ini tercipta sebuah keteraturan yang masif pada tubuh subjek individu dengan skala populasi pada level negara. Bentuk kekuasaan ini dikenal dengan pemerintahan atau *governmentality* yang merupakan sebuah kesenian dalam mematuhan dan mempermudah subjek delusi keteraturan untuk menganggap sesuatu yang diapanggil “nyata” sebagai “kebenaran.”

Foucault memahami bahwa *governmentality* mempunyai seni mencakup mengeksploitasi kekuasaan dengan melibatkan regulasi kompleks atas masyarakat, ia mengungkapkan seni *governmentality* mulai berkembang pada abad ke-18. Munculnya seni *governmentality* menciptakan sebuah paradoks yang menarik, dikarenakan meskipun permasalahan dan isu politik yang terkonsentrasi pada penggunaan teknik dalam praktek kekuasaan melibatkan perjuangan serta persaingan politik, paradoks ini juga muncul akibat dari *governmentality* yang juga dianggap sebagai alat yang memungkinkan negara agar tetap eksis (Foucault 1991, 103).

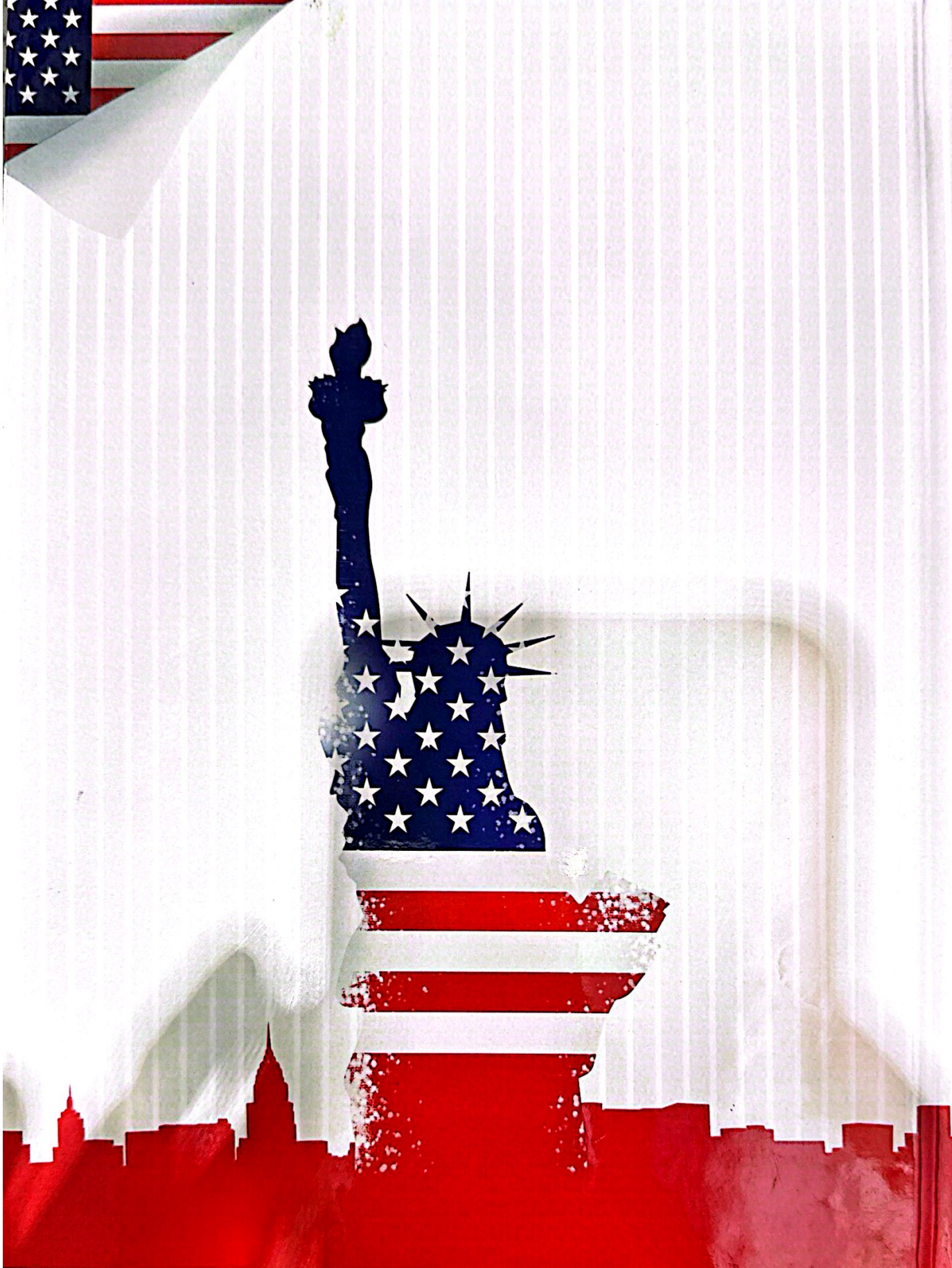
Penelurusan pada abad pertengahan dan zaman klasik menunjukkan berbagai riset disusun sebagai ‘nasehat bagi penguasa’ dalam pelaksanaan kekuasaan yang seharusnya yang berusaha memastikan penerimaan pada ranah masyarakat, serta menunjukkan cinta dan ketaatan kepada Tuhan. Akan

tetapi semenjak pertengahan abad ke-16 sampai akhir abad ke-18, riset-riset ini mulai berkembang sehingga tidak dikenal hanya sebagai 'nasehat,' namun dianggap sebagai karya seni 'pemerintahan' atau *governmentality*. Foucault mendefinisikan *governmentality* sebagai (Foucault 1991, 95):

"Government is defined as a right manner of disposing things so as to lead not to the form of the common good, as the jurists' texts would have said, but to an end which is 'convenient' for each of the things that are to be governed. This implies a plurality of specific aims: for instance, government will have to ensure that the greatest possible quantity of wealth is produced, that the people are provided with sufficient means of subsistence, that the population is enabled to multiply, etc. There is a whole series of specific finalities, then, which become the objective of government as such. In order to achieve these various finalities, things must be disposed - and this term, dispose, is important because with sovereignty the instrument that allowed it to achieve its aim - that is to say, obedience to the laws - was the law itself; law and sovereignty were absolutely inseparable. On the contrary, with government it is a question not of imposing law on men, but of disposing things: that is to say, of employing tactics rather than laws, and even of using laws themselves as tactics - to arrange things in such a way that, through a certain number of means, such and such ends may be achieved."

Foucault berusaha menggambarkan bahwa, 'pemerintahan' melibatkan ansambel institusi, prosedur analisis, refleksi, perhitungan, dan taktik yang mengizinkan pelaksanaan kekuasaan yang sangat spesifik dan kompleks, dengan populasi sebagai sasaran, ekonomi politik sebagai fokus utama pengetahuan, serta aparat keamanan sebagai instrumen teknis yang krusial. Dalam konsep 'pemerintahan', terdapat kecenderungan menuju dominasi atas berbagai bentuk kekuasaan lainnya di seluruh Barat, termasuk kedaulatan dan disiplin. Fenomena ini telah mendorong perkembangan aparatur pemerintah yang khusus dan pengembangan pengetahuan tertentu. Akhirnya, 'pemerintahan' juga mencakup proses di mana negara keadilan abad pertengahan bertransformasi menjadi negara administratif pada abad kelima belas. Dengan demikian, 'pemerintahan' mencakup kompleksitas institusi, dinamika kekuasaan, dan perubahan struktural yang menggambarkan evolusi sistem pemerintahan dari masa ke masa (Foucault 1977, 144).

Foucault pernah menyatakan dominasi yang dilakukan oleh garis kekuatan Barat yang secara repetitif menunjukkan keunggulan atas semua jenis kekuasaan baik kedaulatan, disiplin, dan sebagainya (Foucault 1977, 144).



UKI PRESS
Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang
Jakarta Timur 13630



ukipressdigital.uki.ac.id

